

Pengaruh Pengetahuan DPRD Tentang Anggaran, Pengawasan dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Sikka)

Andi Lukman¹⁾; Herni Sunarya²⁾; Gasim²⁾

¹⁾Alumnus Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

²⁾Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Pengawasan, dan Partisipasi anggaran terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Anggota Dewan Kabupaten Sikka, dengan metode *sampling incidental*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Kupang dengan menggunakan sampel sebanyak 35 responden. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengetahuan deawa tentang anggaran, pengawasan dan partisipasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal inidibuktikan melalui analisis regresi berganda yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0389, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan dan partisipasi terhadap kinerja APBD adalah 45,3%. Hasil uji t statistikmenghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,002 < 0,05$. (2). Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja APBD. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,370,yang dapat diartikan pengetahuan dewan tentang anggaran dapat memoderasi pengaruh terhadap kinerja APBD. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,001 < 0,05$. (3). Pengetahuan dewan tentang pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja APBD. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,524,yang dapat diartikan pengetahuan dewan tentang pengawasan dapat memoderasi pengaruh terhadap kinerja APBD. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,017 < 0,05$. (4). Pengetahuan dewan tentang partisipasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja APBD. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar -0,019,yang dapat diartikan pengetahuan dewan tentang partisipasi tidak dapat memoderasi pengaruh terhadap kinerja APBD. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari *level of significant* yaitu $0,722 > 0,05$.

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan, Pengawasan, Partisipasi dan Kinerja

I. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perundangan otonomi daerah tersebut, maka diharapkan DPRD akan lebih aktif dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu dalam menjalankan fungsi dan perannya, diharapkan dewan memiliki kapabilitas dan kemampuan, antara lain pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah.

Menurut Truman (2011) pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran (Truman

dalam Alek & Mayang, 2011). Yudono (2002) dalam Kurnia (2013) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan *pemerintah*, kebijakan publik dan sebagainya. Kualitas dewan diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih menjadi masalah yang harus dibenahi. Masih ada ketidaksesuaian antara program-program dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana yang dilansir (POS-KUPANG.com) dalam diskusi tentang “Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran” serta keterbukaan informasi publik dan urgensi pembentukan komisi KIP” yang diselenggarakan forum parlemen NTT di gedung DPR NTT. Masalah-masalah penganggaran di NTT dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi manager pemegang saham. Jensen dan meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi dapat tercipta karena adanya kontrak antara prinsipal (pemegang saham dan penyedia hutang) dengan agent (manajer) melakukan pelayanan kepada pemilik perusahaan (Godfrey, 2010) dalam (Octaliana Dan Rahayuningsih, 2013).

2. Teori Kompetensi

Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Bidang Jasa Administrasi Perkantoran (2007), kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (Simson, dkk, 2007). Dengan adanya reformasi keuangan daerah, banyak aspek yang muncul dan menjadi sorotan, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan

Pemerintahan (PP) No.105 Tahun 2000. Yang menjadi perhatian utama adalah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah.

4. Konsep Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pengetahuan merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, berfikir dan pengalaman sehingga membentuk sikap dan tindakan terhadap anggaran. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD senbagai wakil rakyat (Truman dalam Alek dan Mayang, 2011). Kualitas dewan diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pengetahuan yang baik dan berkualitas terhadap pengelolaan dana APBD dapat mengurangi terjadinya dis efisiensi dan dis efektifitas dari pengelolaan APBD, DPRD sebagai pengawas pengelolaan APBD wajib memiliki pengatauan yang baik dan berkualitas.

5. Konsep Pengawasan

Keputusan presiden RI No.74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

6. Konsep Partisipasi Anggaran

Menurut Milani, (1975) dalam Moheri dan Arifah, (2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perancangan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka para manajer merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran sehingga diharapkan para manajer dapat melakukan penyusunan anggaran dengan lebih baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

7. Konsep Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pasal 1 ayat (9), mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Konsep Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, maka penyusunan APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang dicapai berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan suatu sistem, yang dimana sistem ini berkerja untuk membantu atasan

dalam menilai pencapaian suatu strategi yang telah di buat sebelumnya melalui alat ukur finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*) dengan elemen kunci menurut (Bastian, 2001 dalam febrina, 2016) sebagai berikut: Perencanaan dan penetapan tujuan, Pengembangan ukuran yang relevan, Pelaporan formal atas hasil penggunaan informasi.

9. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Konseptual

1) Pengetahuan DPRD tentang anggaran terhadap kinerja anggaran

Menurut Yudoyono (2002) dalam Nayang (2008) dalam Utami dan Syofyan (2013), pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota dewan tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja anggaran terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Ha1 : Pengetahuan DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran belanja di Kabupaten Sikka.

2) Pengawasan DPRD berpengaruh terhadap kinerja anggaran belanja di Kabupaten Sikka.

Susanti (2007) dalam Alek Murtin (2011) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian tersebut ditemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial. Sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran belanja di Kabupaten Sikka

3) Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran belanja di Kabupaten Sikka.

Arfan dan La Ane dalam Alek Murtin (2011) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dan pengujian hipotesis menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi dewan sebagai pemegang amanat anggaran daerah, maka dalam proses perencanaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik. Dewan sebagai pemegang perencanaan daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan publik serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Berdasarkan logika hipotesis di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran belanja di Kabupaten Sikka.

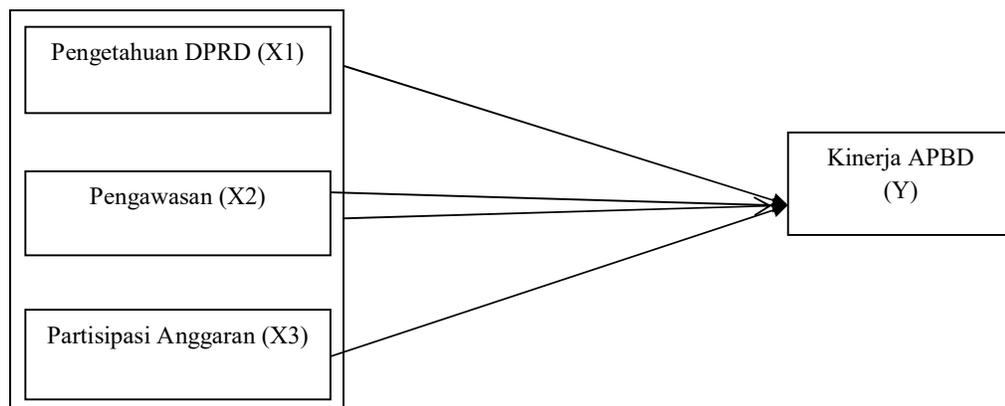
- 4) Pengetahuan DPRD, pengawasan, dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka.

Alamsyah (1997) dalam Yolinda Devi Pratami (2010) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yudono (2002) dalam Yolinda Devi Pratami (2010) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Ha4 : Pengetahuan DPRD, pengawasan, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka.

10. Kerangka Berpikir

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis penelitian dijelaskan pada gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Olahan Penulis, 2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan/Desain Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam melakukan langkah-langkah praktis terhadap suatu obyek yang menjadi permasalahan. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara yang satu variable dengan variable yang lainnya yang bukan merupakan sebab dan akibat, pendekatan yang memberikan suatu gambaran permasalahan untuk mencari hubungan antara variable X dengan variable Y (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang memerlukan perhitungan menggunakan *software* SPSS.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah anggota DPRD yang berjumlah 35 orang yang terdapat pada kantor DPR kabupaten Sikka. Pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD di kabupaten Sikka.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Alek, (2011:64) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan kriteria anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena komisi inilah yang berkaitan dengan APBD.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang tingkat validitasnya dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan sumber dan metode pengumpulan data yang kredibel, Surepno (2015). Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian survey karena dilakukan dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan tertulis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui survey kuisioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti. Sekaran dan Bougie (2011:197) ketika kuisioner diantar dan diambil sendiri memiliki manfaat, yaitu pengambilan datanya lebih cepat dan apabila ada pertanyaan dari kuisioner yang sulit untuk dipahami, peneliti dapat menjelaskannya sehingga tingkat *error* data berkurang.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pengetahuan DPRD tentang anggaran, pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah. Sebagai upaya membantu pemahaman terhadap konsep – konsep yang terkait dalam pembahasannya, maka perlu adanya operasionalisasi terhadap variabel yang akan dibahas serta indikator-indikatornya. Secara garis besar variabel operasional dari penelitian ini adalah seperti tampak pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

No.	Definisi Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Pengetahuan dewan tentang anggaran(X1) adalah merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman dalam Alek & Mayang, 2011). Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penyusunan APBD dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pelaksanaan APBD;	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif; b. Prinsip anggaran yang bersifat komprehensif; c. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah; d. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD; e. Pertanggungjawaban perhitungan; f. Kebijakan Umum APBD; g. Sistem Informasi Akuntansi h. Kebcoran anggaran i. Jumlah anggaran; dan j. Memiliki pengetahuan. 	Menggunakan Skala Likert 5 – 1.
2.	Pengawasan (X2) adalah kegiatan	a. Pengawasan dalam proses	Menggunakan

	dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim dalam Alek, 2011). Keterlibatan Dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, pelaksanaan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan dalam pengesahan APBD. c. Dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. d. Pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. 	Skala Likert 5 – 1.
3.	Partisipasi anggaran(X3) adalah partisipasi anggaran sebagai suatu proses partisipasi individu akan dievaluasi dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan prestasi mereka pada sasaran. (Brownell,1986 dalam Nur Endah,2011). pencapaian tujuan merupakan tolak ukur dalam suatu anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. merevisi anggaran anggaran b. banyaknya input memandang kontribusi / pendapat dalam penyusunan anggaran. 	Menggunakan Skala Likert 5 – 1.
4.	Kinerja (Y) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsum 2009 dalam Karinda, 2012). Dengan demikian tercipta, Persiapan, Ratifikasi, Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Indikator Masukan (<i>input</i>); b. Indikator proses (<i>process</i>); c. Indikator Keluaran (<i>output</i>); d. Indikator hasil (<i>outcome</i>); e. Indikator manfaat (<i>benefits</i>). 	Menggunakan Skala Likert 5 – 1.

Dalam operasionalisasi variabel ini, variabel X diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuisioner yang memenuhi pernyataan – pernyataan tipe skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2012 : 93) adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan. Untuk digunakan jawaban yang dipilih. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item – item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala *likert* berisi lima tingkat jawaban, berikut tabel skor Skala *likert* :

Tabel 2. Skor Skala Likert

Jawaban		Skor
Sangat setuju	Sangat paham	5
Setuju	Paham	4
Ragu – ragu	Netral	3
Tidak setuju	Tidak paham	2
Sangat tidak setuju	Sangat tidak paham	1

Sumber: Sugiyono (2012:94)

Skala likert 1, sangat tidak setuju diindikasikan bahwa responden menganggap bahwa variable pengetahuan dewan tentang anggaran, kinerja dewan dan, pengawasan anggaran sangat berhubungan terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan dalam pasal 1 Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (Simson, dkk, 2007). Dengan adanya reformasi keuangan daerah, banyak aspek yang muncul dan menjadi sorotan, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No.105 Tahun 2000. Yang menjadi perhatian utama adalah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Paradigma yang menuntut lebih besarnya akan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Abdul, 2004).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian yang mengukur variable dengan menggunakan instrument dalam kuisioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor kostruk (Ghozali, 2006: 50). Metode *pearson correlation* menyatakan butir pertanyaan/pernyataan dikatakan valid apabila signifikansi butir pertanyaan/pernyataan (*2-tailed*) $\leq 0,05$ dan atau $\leq 0,01$. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2006: 46). Sementara uji reliabilitas, Stainback, (1988) sebagaimana dikutip oleh Sugiono, (2007) berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistic (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua tidak menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam melakukan uji reliabilitas dapat dilakukan menggunakan teknik formula Spearman Brown (Sugiyono, 2007:186).

G. Analisis Regresi

Data dianalisis dengan metode Regresi Linear Berganda atau *multiple linear regression*, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen yaitu pengetahuan DPRD tentang anggaran (X1), Pengawasan DPRD (X2), partisipasi anggaran (X3), terhadap variable dependen (Y) yaitu Kinerja APBD. Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda dalam aplikasinya adalah sebagai berikut, Supranto (1996:272) :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja APBD; a = Konstanta; b = Koefisien regresi; X_1 = Pengetahuan DPRD tentang APBD; X_2 = Pengawasan DPRD; X_3 = Partisipasi APBD; e = Error (kesalahan regresi).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Anggota Dewan

Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang terdaftar di kantor DPRD Kabupaten Sikka yaitu sebanyak 35 anggota. Peneliti menyebarkan 35 kuisisioner, dan tetapi hanya 33 kuisisioner yang bisa dijadikan data penelitian karena terdapat 2 kuisisioner yang tidak diisi dengan lengkap.

B. Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian.

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan, pengawasan, partisipasi dan pendapatan (independen) dan Kinerja APBD. Data variable-variabel tersebut diperoleh dari hasil penyebaran angket. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 3. Total Skor Kuesioner (Data Primer Yang Diolah (2018))

Variabel	Item Pertanyaan	Total SS	%	Total S	%	N	%	Total TS	%	Total STS	%
Pengathuan (X1)	1	17	52%	16	48%	0	0%	0	0%	0	0%
	2	17	52%	16	48%	0	0%	0	0%	0	0%
	3	17	52%	16	48%	0	0%	0	0%	0	0%
	4	17	52%	16	48%	0	0%	0	0%	0	0%
	5	16	48%	17	52%	0	0%	0	0%	0	0%
	6	19	58%	14	42%	0	0%	0	0%	0	0%
	7	19	58%	14	42%	0	0%	0	0%	0	0%
	8	17	52%	16	48%	0	0%	0	0%	0	0%
	9	20	61%	13	39%	0	0%	0	0%	0	0%
	10	23	70%	10	30%	0	0%	0	0%	0	0%
Pengawasan (X2)	11	9	27%	24	73%	0	0%	0	0%	0	0%
	12	2	6%	30	91%	1	3%	0	0%	0	0%
	13	6	18%	27	82%	0	0%	0	0%	0	0%
	14	4	12%	29	88%	0	0%	0	0%	0	0%
Partisipasi (X2)	15	10	30%	10	30%	12	37%	0	0%	1	3%
	16	21	64%	12	26%	0	0%	0	0%	0	0%
Kinerja (X3)	17	27	82%	6	18%	0	0%	0	0%	0	0%
	18	18	54%	15	45%	0	0%	0	0%	0	0%
	19	11	33%	22	67%	0	0%	0	0%	0	0%

	20	17	52%	16	48%	0	0%	0	0%	0	0%
	21	14	42%	19	58%	0	0%	0	0%	0	0%
	22	16	48%	17	52%	0	0%	0	0%	0	0%

a. Variabel Pendapatan

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan untuk variabel pengetahuan, item pertanyaan 1, sebanyak 52% responden menyatakan sangat setuju, bahwa anggaran mendapatkan otoritas legislatif, dan prinsip anggaran, 48% menyatakan setuju dan 0% menyatakan netral. Untuk item pertanyaan 2, sebanyak 52% responden menyatakan sangat setuju bahwa prinsip anggaran yang bersifat komprehensif, 48% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 3, sebanyak 52% responden menyatakan sangat setuju anggaran di susun oleh DPRD bersama kepala daerah, 48% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 4, sebanyak 52% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya penyusunan dan perhitungan APBD, 48% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 5, sebanyak 48% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya pertanggungjawaban dan perhitungan, 52% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 6, sebanyak 58% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya terdapat kebijakan umum dalam APBD, 42% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 7, sebanyak 58% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya sistem informasi, 42% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 8, sebanyak 52% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya kejadian kebocoran anggaran, 42% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 9, sebanyak 61% responden menyatakan sangat setuju bahwa jumlah anggaran yang sesuai kebutuhan, 39% menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Untuk item pertanyaan 10, sebanyak 70% responden menyatakan sangat setuju bahwa memiliki pengetahuan umum dan khusus tentang anggaran, 30% menyatakan setuju, 11% menyatakan netral dan 1% menyatakan tidak setuju.

b. Variabel pengawasan

Untuk variabel pengawasan, item pertanyaan 11, sebanyak 27% responden menyatakan sangat setuju, bahwa pengawasan dalam penyusunan, 73% responden menyatakan setuju dan 0% menyatakan netral. Pada item pertanyaan 12, sebanyak 6% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya pengesahan dalam pengawasan, 91% responden menyatakan setuju dan 3% menyatakan netral. Untuk variabel pengawasan, item pertanyaan 13, sebanyak 18% responden menyatakan sangat setuju, bahwa pengawasan dalam penyusunan turun tangan kepala daerah, 82% responden menyatakan setuju dan 0% menyatakan netral. Untuk variabel pengawasan, item pertanyaan 14, sebanyak 12% responden menyatakan sangat setuju, bahwa pengawasan dalam penyusunan, 88% responden menyatakan setuju dan 0% menyatakan netral.

c. Variabel partisipasi

Untuk variabel partisipasi, pada item pertanyaan 15, sebanyak 30% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya revisi-revisi anggaran, sebanyak 30% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju dan 3% responden menyatakan sangat tidak setuju. Untuk variabel partisipasi, pada item pertanyaan 16, sebanyak 64% responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya *input* kontibusi, sebanyak 26% responden menyatakan setuju, 0% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

d. Variabel Kinerja

Pada Variabel kinerja, item pertanyaan 17, sebanyak 82% responden menyatakan sangat setuju adanya *process* APBD, 18% responden menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Pada Variabel kinerja, item pertanyaan 18, sebanyak 55% responden menyatakan sangat setuju adanya *input* APBD, 45% responden menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Pada Variabel kinerja, item pertanyaan 19, sebanyak 33% responden menyatakan sangat setuju adanya *output* APBD, 67% responden menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Pada Variabel kinerja, item pertanyaan 20, sebanyak 52% responden menyatakan sangat setuju adanya rencana kinerja APBD, 48% responden menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Pada Variabel kinerja, item pertanyaan 21, sebanyak 42% responden menyatakan sangat setuju adanya *outcome* APBD, 58% responden menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju. Pada Variabel kinerja, item pertanyaan 22, sebanyak 48% responden menyatakan sangat setuju adanya *benefits* APBD, 52% responden menyatakan setuju, 0% menyatakan netral dan 0% menyatakan tidak setuju.

C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *bivariate*. Dari 10 item pernyataan untuk pengetahuan DPRD tentang Anggaran memiliki nilai-nilai koefisien validitas untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari *cronbach's alfa* > 0.60 sehingga dapat dikatakan bahwa item-item pernyataan tersebut adalah valid. Sedangkan dari 4 item pernyataan untuk partisipasi anggaran memiliki nilai-nilai koefisien validitas untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari *cronbach's alfa* > 0.60 sehingga dapat dikatakan bahwa item-item pernyataan tersebut adalah valid. Sedangkan dari 2 item pernyataan untuk pengawasan anggaran memiliki nilai-nilai koefisien validitas untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari *cronbach's alfa* > 0.60 sehingga dapat dikatakan bahwa item-item pernyataan tersebut adalah valid. Sementara Uji Reliabilitas, hasil perhitungan dapat diketahui bahwa reliabilitas untuk Pengetahuan DPRD tentang anggaran sebesar 0.525.

D. Analisis Regresi

Data dianalisis dengan metode Regresi Linear Berganda atau *multiple linear regression*, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen yaitu pengetahuan DPRD tentang anggaran (X1), Pengawasan DPRD (X2), partisipasi anggaran (X3), terhadap variable dependen (Y) yaitu Kinerja APBD. Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Tabel 4. Uji Hipotesis (Data primer yang di olah, 2018)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.433	5.963		3.259	.003
Pengathuan	.370	.103	.523	3.599	.001
Pengawasan	.524	.206	.370	2.538	.017
Partisipasi	-.070	.195	-.052	-.360	.722
Nilai F = 6.151, sig. 0.002					

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel pengetahuan atau X1 sebesar 3,599. Koefisien regresi variabel pengawasan atau X2 sebesar 2,539, dan koefisien regresi variabel partisipasi atau X3 sebesar 0,360. Dengan demikian model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 19.433 + 0,370X_1 + 0,524X_2 - 0,070X_3 + e$$

Hasil analisis dengan SPSS versi 16.00 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasil analisis dari, pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan mem-bandingkan nilai t-hitung dan t-tabel. Hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel dan nilai sig < $\alpha = 0,05$. Nilai t-tabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,045. Untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) nilai t-hitung adalah 3,599 dan nilai sig adalah 0,001. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t-hitung > t-tabel, yaitu $3,599 > 2,045$, nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$ dan koefisien β positif sebesar 0.370. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini diterima.

- 2) Pengawasan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasil analisis dari, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel. Hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel dan nilai sig < $\alpha = 0,05$. Nilai t-tabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,045. Untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) nilai t-hitung adalah 2.538 dan nilai sig adalah 0,022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t-hitung > t-tabel, yaitu $2.538 > 2,045$, nilai signifikansi $0,017 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua secara signifikansi pada penelitian ini diterima.

- 3) Partisipasi dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasil analisis dari pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel. Hipotesis diterima jika t-hitung > t-tabel dan nilai sig < $\alpha = 0,05$. Nilai t-tabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,045. Hasil analisis diperoleh nilai variabel X2 nilai t-hitung adalah -0,360 dan nilai sig adalah 0,722. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t-hitung < t-tabel, yaitu $-0,360 < 2,045$, nilai signifikansi $0,722 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga secara signifikansi pada penelitian ini ditolak.

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y sebesar $0.002 < 0,05$ dan nilai F hitung $6.151 > F$ tabel 2.092 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 di terima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y.

D. Pembahasan Hipotesis

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penjelasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut.

1) Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja APBD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,001 (kecil dari $\alpha=0,05$), koefisien β positif sebesar 0,370 dan nilai t-hitung $>$ t-tabel, yaitu $3,599 > 2,045$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka kinerja APBD akan semakin baik.

Hasil ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Yudoyono (2002) dalam Trini, (2013), DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta me-nempatkan kedudukannya secara pro-porsional. Hal ini dapat terjadi jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alek dan Mayang yang menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan terhadap pengawasan APBD. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Wulan dan Deviani (2013) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pendapat ini juga didukung oleh Rosseptalia (2006) yang menyatakan bahwa salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah.

Dilihat dari distribusi frekuensi, bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja APBD. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja APBD. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan yang menunjukkan nilai rerata TCR yang baik yaitu sebesar 86,20%, yang berarti bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya, dengan adanya kualitas pengetahuan dewan yang baik tentang anggaran maka kinerja anggaran keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga pembangunan daerah pun akan berjalan dengan lancar.

2) Pengaruh Pengawasan Dewan Tentang Anggaran terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja APBD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,017 (kecil dari $\alpha=0,05$), koefisien β positif sebesar 0,524 dan nilai t-hitung $>$ t-tabel, yaitu $2,538 > 2,045$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengawasan dewan tentang anggaran maka kinerja APBD akan semakin baik.

Hasil ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Yudoyono (2002) dalam Trini, (2013), DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta me-nempatkan kedudukannya secara pro-porsional. Hal ini

dapat terjadi jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alek dan Mayang yang menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan terhadap pengawasan APBD. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Wulan dan Deviani (2013) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pendapat ini juga didukung oleh Rosseptalia (2006) yang menyatakan bahwa salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari distribusi frekuensi, bahwa pengawasan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja APBD. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja APBD. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan yang menunjukkan nilai rerata TCR yang baik yaitu sebesar 86,20%, yang berarti bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa pengawasan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya, dengan adanya kualitas pengawasan dewan yang baik tentang anggaran maka kinerja anggaran keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga pembangunan daerah pun akan berjalan dengan lancar.

3) Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi Anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,722 (kecil dari $\alpha=0,05$), koefisien β negatif sebesar -0,070 dan nilai t -hitung < t -tabel, yaitu $-0,360 < 2,045$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran maka kinerja anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rani (2014), yang menguji pengaruh partisipasi anggaran dan realisasi pendapatan belanja daerah pemerintah kota samarinda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap hubungan kinerja anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini juga didukung oleh pendapat Sopanah dan Wahyudi (2010) dalam Trini Wulandari(2013) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dilihat dari Tabel distribusi frekuensi, partisipasi memiliki nilai rerata TCR sebesar 37,17% yang berarti partisipasi berada dalam kategori tidak baik. Dilihat dari nilai signifikansinya partisipasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja APBD dimana nilai signifikansinya besar dari $\alpha=0,05$, yaitu sebesar 0,722. Hal ini dapat terlihat dari koefisien β yang bernilai negatif, yaitu sebesar -0,019. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010) dalam Trini Wulandari(2013) yang menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan .

4) Uji Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa variabel independen, pengetahuan, pengawasan dan partisipasi secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja APBD Kabupaten Sikka. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari uji ANOVA atau F test. Didapat F hitung sebesar 1.151, sedangkan tingkat probabilitas 0,002 (signifikansi). Dengan melihat asumsi di atas, maka probabilitas lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung lebih besar daripada F tabel artinya H_0 ditolak dan menerima H_4 . Berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja APBD atau dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa variabel independen pengetahuan, pengawasan dan partisipasi secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Sikka.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada DPRD Kabupaten Sikka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,001 dan p-value sebesar 3.599. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_1 diterima artinya pengetahuan DPRD tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja APBD di Kabupaten Sikka;
- 2) Pengaruh pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.538 dan p-value sebesar 0,017. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_2 diterima artinya pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja APBD di Kabupaten Sikka;
- 3) Pengaruh partisipasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,360 dan p-value sebesar 0,722. Karena nilai $p > 0,05$, maka H_3 tidak diterima artinya partisipasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja APBD di Kabupaten Sikka; dan
- 4) Pengaruh pengetahuan DPRD tentang anggaran, pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja APBD. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai fhitung sebesar 6.151 dan p-value sebesar 0.002. Karena $p < 0,05$, maka H_4 F tabel 2.092 yang berarti pengetahuan, pengawasan dan partisipasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Sikka.

Data penelitian ini diperoleh dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen penelitian. Hal ini tentu dapat mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi yang disampaikan oleh responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dan pastinya akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk penelitian berikutnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Diharapkan anggota DPRD Kabupaten Sikka lebih memperhatikan komitmen untuk masyarakat dan tidak terbatas pada intervensi dan tuntutan partai;

- 2) Bagi penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya;
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, menambahkan variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi kinerja APBD, seperti prinsip value for money, budaya organisasi, komitmen organisasi dan lain sebagainya. Sebaiknya pe-ngumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan anggota dewan;
- 4) Penelitian berikutnya disarankan menggunakan metode wawancara langsung kepada anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga jawaban responden dapat dikontrol dan tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrument penelitian yang digunakan; dan
- 5) Bagi anggota dewan, diharapkan agar lebih memaksimalkan fungsinya sebagai wakil rakyat. Meningkatkan lagi pengetahuan yang dimiliki, seperti dengan mengadakan atau mengikuti pelatihan pendidikan terkait dengan penganggaran keuangan daerah, sehingga dewan dapat memahami dan mengaplikasikan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.
- 6) Dimana dari model yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 20,3%. Sedangkan 79,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga variabel yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja APBD. Diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan variabel-variabel bebas, objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti Restu, 2012 *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi studi kasus pada pemerintah kabupaten bengkalis*. Jurnal Vol 20, No 3.
- Aira Aras, 2014. *Pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan anggaran studi: empiris pada kabupaten kampar*. Jurnal Fekonso UIN Suska.
- Arifah, dkk, 2015. *Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial*.
- Chrisman Y Karinda, 2012. *Analisis kinerja anggaran belanja pada badan pengelolaan keuangan barang milik daerah provinsi sulawesi utara*. Jurnal.
- Ermawati Nenek, 2017. *Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi kerja sebagai variabel pemoderasi (studi kasus skpd kabupaten pati)*
- Halim Abdul, 2007. *Akuntansi pengendalian pengelolaan keuangan daerah*. UGM: Jogjakarta.
- Kartika dan Sugiarto, 2014. *Pengaruh tingkat kompetensi terhadap kinerja pegawai administrasi perkantoran*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XVII No. 1.
- Kencana Putra, 2016. *Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (apbd) dengan variabel moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

- Murtin Alek, 2011. *Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan terhadap pengawasan APBD : partisipasi pengawasan sebagai variabel moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman: 60-71.
- Octaliana dan Rahayu, 2013. *Analisis pemilihan managerial berbasis pada teori keagenan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.15 No. 1.
- Ramadani Rani Febri, 2014. *Analisi kinerja anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota samarinda*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ranifebri94@yahoo.com
- Ramang Rengki, 2016. *Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 *E-mail: rengki_sinaga@yahoo.co.id*
- Ryadi Anton, 2007. *Pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam hubungan dengan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja*. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 8 No. 2, hal: 128-136.
- Sugiyono, 2007. *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta: bandung
- Utami Kurnia, 2013. *Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik*. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013
- Verasvera Febrina Astria, 2016. *Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah , setudi kasus pada dinas nasional provinsi jawa barat*. Jurnal Manajemen, Vol.15, No.2, Mei 2016
- Wikipedia, 2017, Kabupaten Sikka, 11. [http:// www. Sikkaab.go.id/dprd.id.com](http://www.Sikkaab.go.id/dprd.id.com)
- Wulandari Nur Endah, 2011. *Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah :kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating . Skripsi Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2011*.
- Wulandari Trini, 2013. *Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik sebagai variabel pemoderasi*. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013
- Yulinda P Devi, 2010. *Pengathuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan dewan (APBD)*. Jurnal SNA XIII
- Yuliusman, 2012. *Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengartahuan anggota DPRD tentang anggaran dengain pengawasan APBD survey terhadap anggota DPRD provinsi jambi*. Jurnal ISSN 0852-8349